

KATEGORI

Kependudukan Dan Ketenagakerjaan

SUB KATEGORI

Kependudukan

NAMA INDIKATOR

Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah

TAHUN

2017

KONSEP

- Jumlah lembaga pelatihan kerja pemerintah adalah banyaknya lembaga pelatihan kerja yang dibuat oleh negara, yang keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan yang tujuan akhirnya bertujuan menciptakan pekerja indonesia yang maju dan bisa berkompetisi.
- Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.

RUJUKAN

Undang-Undang RI No 13 Tahun 2003

RUMUS

-

WALI DATA

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, Pemberday

UKURAN

Lembaga

UNIT

Kepala Dinas Sosial

KEGUNAAN

Mengetahui jumlah lembaga pelatihan kerja yang didirikan dan dikelola oleh pemerintah/negara

INTERPRETASI

Jumlah lembaga pelatihan kerja pemerintah menunjukkan banyaknya lembaga pelatihan kerja yang dibuat oleh negara, yang keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan yang tujuan akhirnya bertujuan menciptakan pekerja indonesia yang maju dan bisa berkompetisi.

KETERANGAN

-

SUMBER

Sensus Ekonomi

METODOLOGI

Metode listing usaha/Perusahaan:Pencacahan dilakukan di seluruh wilayah NKRI, mencakup seluruh usaha ekonomi.

Metode Pendataan Karakteristik Usaha Mikro:Pencacahan dilakukan secara sampel berdasarkan frame hasil listing SE 2016

Metode Pendataan karakteristik Usaha Menengah Besa: Dilakukan secara sensus untuk Seluruh usaha/perusahaan dengan skala usaha menengah dan besar

KEDALAMAN DATA

Nasional, Provinsi, Kabupaten

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

BPS RI

DOKUMEN

SIPD

